

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERUSAHAAN DALAM UPAYA MENDUKUNG KESEHATAN PEKERJA PEREMPUAN

Elsha Ardianti¹, Emy Huriyati², Yayuk Hartriyanti²

INTISARI

Latar Belakang: Peningkatan angka partisipasi dari pekerja perempuan terus meningkat ditinjau dari tingkat partisipasi angkatan kerja Indonesia yang menunjukkan angka sebesar 54,27%. Kondisi biologis yang melekat pada perempuan seperti haid, hamil, melahirkan, dan menyusui dapat meningkatkan risiko bahaya kesehatan pada pekerja perempuan terkhusus di lingkungan kerja. Didasarkan oleh kondisi tersebut, pemerintah menyusun Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 sebagai bentuk perlindungan. Walaupun begitu masih banyak pelanggaran yang dalam proses implementasi ini sehingga perlu untuk dikaji lebih lanjut.

Tujuan: Mengetahui gambaran proses implementasi kebijakan terkait kesehatan pekerja perempuan di perusahaan. Selain itu mengetahui faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan di perusahaan.

Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus kemudian dilakukan triangulasi metode. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak manajerial yaitu *human resource* dan supervisor juga kepada pekerja perempuan, observasi, dan studi dokumen.

Hasil: Implementasi kebijakan terkait kesehatan pekerja perempuan telah dilaksanakan oleh perusahaan dengan cukup baik. Hak yang dipenuhi berupa cuti haid, cuti hamil dan melahirkan, kesempatan laktasi, dan jaminan kesehatan. Perusahaan memiliki komunikasi yang baik, disposisi yang positif terhadap kebijakan, dan struktur birokrasi yang cukup jelas. Perusahaan belum memenuhi aspek sumber daya dengan maksimal dan kebijakan belum dimanfaatkan secara optimal.

Kesimpulan: Implementasi kebijakan telah berjalan dengan cukup baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Perusahaan perlu untuk segera mengimplementasikan kebijakan laktasi.

Kata Kunci: kebijakan kesehatan, pekerja perempuan, gizi kerja, implementasi

¹Mahasiswa Program Studi Gizi Kesehatan FK-KMK UGM

²Departemen Gizi Kesehatan FK-KMK UGM

ANALYSIS OF COMPANY POLICY IMPLEMENTATION IN SUPPORTING WOMEN WORKER HEALTH

Elsha Ardianti¹, Emy Huriyati², Yayuk Hartriyanti²

ABSTRACT

Background: The increase in the participation rate of female workers continues to increase in terms of the Indonesian labor force participation rate which shows a figure of 54.27%. Biological conditions inherent in women such as menstruation, pregnancy, childbirth and breastfeeding can increase the risk of health hazards to women workers, especially in the work environment. Based on these conditions, the government drafted Law no. 13 of 2003 as a form of protection. Even so, there are still many violations in the implementation process that need further study.

Objective: Knowing the description of the policy implementation process related to women workers' health in the company. In addition, knowing the factors that support policy implementation in the company.

Method: This research used a qualitative method with a case study approach and then triangulated the methods. Data was collected through in-depth interviews with managerial parties, namely human resources and supervisors as well as female workers, observation, and document study.

Results: The implementation of policies related to women workers' health has been implemented by the company quite well. Rights that are fulfilled are menstrual leave, maternity and paternity leave, lactation opportunities, and health insurance. The company has good communication, a positive disposition towards the policy, and a fairly clear bureaucratic structure. The company has not fulfilled the resource aspect optimally and the policy has not been optimally utilized.

Conclusion: The implementation of the policy has been running quite well in accordance with Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003. The company needs to immediately implement the lactation policy.

Keywords: health policy, women workers, occupational nutrition, implementation

¹Student of Nutrition and Health Undergraduate Program FK-KMK UGM

²Nutrition and Health Departement FK-KMK UGM